



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

**TESIS**

**Andi Erwing  
NPM: 0806437922**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL  
DEPOK  
JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains (MSi) dalam Program Studi Sosiologi  
Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial**

**Andi Erwing  
NPM: 0806437922**

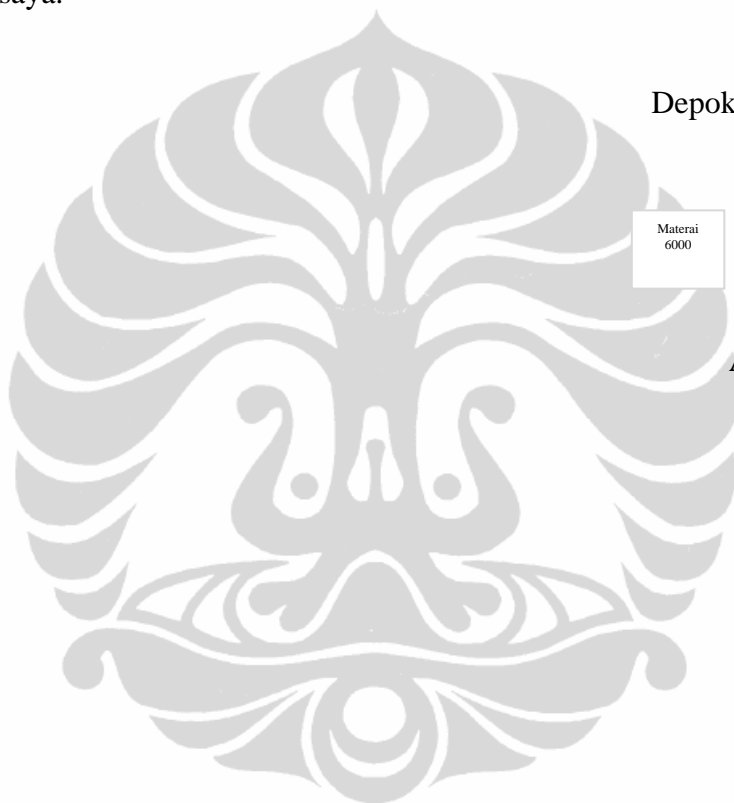
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
KEKHUSUSAN MAGISTER MANAJEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL  
DEPOK  
JULI 2010**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 7 Juli 2010



Materai  
6000

Andi Erwing

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Andi Erwing  
NPM : 0806437922**

**Tanda Tangan:**

**Tanggal : Juli 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Andi Erwing  
NPM : 0806437922  
Program Studi : Sosiologi Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial  
Judul Tesis : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
(Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Pascasarjana Departemen Sosiologi Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Lugina Setyawati, Ph.D ( )

Sekretaris Sidang : Lidya Triana, M.Si ( )

Pembimbing : Dr. Linda Darmajanti, MT ( )

Penguji Ahli : Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto, MA ( )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 7 Juli 2010

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Megister Sains Jurusan Sosiologi Kekhususan Magister Manajemen Pembangunan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Linda Darmajanti, MT, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto, MA, selaku Penguji Ahli yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membaca tesis ini secara teliti dan seksama.
- (3) Lugina Setyawati, PhD, selaku Ketua Jurusan Pascasarjana Sosiologi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membaca tesis ini secara teliti dan seksama.
- (4) Lydia Triana, Msi, selaku Sekretaris Jurusan Pascasarjana Sosiologi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membaca tesis ini secara teliti dan seksama.
- (5) Drs. Dadang Solihin, MA, Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Bappenas, yang telah banyak memberikan dukungan dan mengarahkan guna penyelesaian tesis ini.
- (6) Kasubdit dan staf Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Bappenas, yang telah banyak memberi masukan, dukungan dan semangat guna penyelesaian tesis ini.
- (7) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (8) Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (9) Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (10) Universitas Tanjung Pura yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (11) LSM Cabe Rawit Sulawesi Selatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (12) LSM Persada Kalimantan Barat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (13) Pengurus dan Anggota *Credit Union* Pancur Kasih yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
- (14) Kedua Orang Tuaku dan Istriku serta Anakku Andi Najafy Tengko yang telah memberikan dukungan moral.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Erwing

NPM : 0806437922

Program Studi : Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial

Departemen : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
(Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 7 Juli 2010

Yang menyatakan

(Andi Erwing)



## ABSTRAK

Nama : Andi Erwing  
Program Studi : Sosiologi Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial  
Judul : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
(Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat)

Salah satu permasalahan utama pembangunan adalah masih besarnya jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagai upaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan maka pada tahun 2009 pemerintah Indonesia memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 38 tahun 2008 dengan tema utama **“Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”**. Prioritas tersebut fokus pada 1) Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin dan fokus 2) Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat serta fokus 3) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi yang terkait dengan relevansi perencanaan, efektivitas biaya, proses, keluaran dan hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RKP 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui penyebab perbedaan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek relevansi perencanaan, efektivitas alokasi biaya penanggulangan kemiskinan, proses, keluaran dan hasil pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta aspek lainnya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis data kuantitatif ataupun data kualitatif melalui pemaknaan (*understanding of understanding*)

Hasil evaluasi berdasarkan persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, maka diketahui faktor penyebab lebih cukup tingginya penurunan tren penduduk miskin di Kalimantan Barat yaitu faktor relevansi perencanaan, keluaran, hasil dan efektifitas biaya pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan RKP 2009 yang cukup baik. Namun jika dinilai dari skor maksimal yaitu 10, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kedua lokasi belum maksimal memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, karena rata-rata skor semua aspek yang dievaluasi di kedua lokasi hanya pada skor 7.

Atas dasar inilah kemudian faktor lain diidentifikasi, berdasarkan hasil identifikasi kebijakan lokal dan identifikasi kegiatan masyarakat, maka ditemukan faktor lain yang secara kualitatif dinilai memiliki pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk

miskin di Kalimantan Barat yaitu adanya *Credit Union (CU)* yang dikembangkan oleh masyarakat. Walaupun demikian kami rekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang CU ini, untuk mengetahui secara pasti tingkat pengaruhnya terhadap penurunan persentasi penduduk miskin.

Untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dimasa datang, penulis memberi usulan (sesuai skenario III) agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik lokal, maka aspek pertama yang perlu dibenahi adalah sistem perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang ada dalam RKP. Dimana anggaran penanggulangan kemiskinan masih menggunakan mekanisme Dana Urusan Bersama (DUB). DUB yang tersentralisasi perencanaan dan penganggarnya ini direkomendasikan untuk direformulasi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga daerah lebih berdaya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik daerah sebagaimana hasil penelitian ini. Pengalihan menjadi DAK bukanlah merupakan hal tidak mungkin, karena sudah didukung oleh 2 kebijakan yaitu UU nomor 33 tahun 2004 pasal 108 dan PP no 7 tahun 2008 pasal 76 ayat 1. Selanjutnya penyempurnaan formulasi DAK tidak hanya untuk pembangunan sarana fisik saja tetapi dapat digunakan untuk non-fisik dengan perencanaan dan pelaksanaannya dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama dengan *stakeholders* lainnya.

## ABSTRACT

Name : Andi Erwing  
Program Study : Sociology Specialization of Social Development Management  
Title : Poverty Reduction Policy  
(Poverty Reduction Policy Evaluation in South Sulawesi Province and West Kalimantan Province)

One major problem of development is a large number of Indonesian population live below the poverty line. In an effort to accelerate poverty reduction in 2009, the Indonesian government to prioritize poverty reduction in the Government Work Plan 2009 (*RKP* 2009) which was ratified by Presidential Decree No. 38 in 2008 with the main theme of "Improving People's Welfare and Poverty Reduction." These priorities focus on a) Development and Improvement of Social Protection System Particularly for the Poor and focus 2) Improvement and Expansion of Scope of Community Based Development Program and focus 3) Empowerment of Small and Micro Enterprises.

This paper aims to describe the evaluation results relating to the relevance of planning, cost effectiveness, processes, outputs and results of poverty reduction policies in the *RKP* 2009 in South Sulawesi Province and West Kalimantan Province.

The research aims to find the cause of the differences decrease in the number of poor people in West Kalimantan Province, compared with the South Sulawesi Province. This can be seen from the aspect of relevance to the planning, effectiveness of budget allocation for poverty reduction, processes, outputs and results of the implementation of poverty reduction policies and other aspects so that it can be used as a policy recommendation to reduce poverty. The evaluation was done with a qualitative methods, qualitative methods will be used to describe and analyze the quantitative data or qualitative data through understanding of understanding.

Evaluation results based on the perceptions of stakeholders towards the implementation of poverty reduction in West Kalimantan and South Sulawesi shows the unknown factors causing the high decline in the trend of poor people in West Kalimantan. The factors are the relevance factor of planning, outputs, outcomes and cost effectiveness of the implementation of poverty reduction policies in *RKP* 2009 that good enough. However, if judged from the maximum score is 10, it can be said that the implementation of poverty reduction policies in the two provinces were not optimally contribute to the decline in the number of poor people, because the average score of all the aspects that were evaluated in both locations have only scored seven.

On the basis of this evaluation, other factors have been identified. Based on the identification of local policies and identification of community activities, other factors have been founded that are qualitatively judged to have the effect of decreasing the percentage of poor people in West Kalimantan, namely the Credit Union, which was developed by the community.

For the implementation of poverty reduction policies in the future, the author gives a suggestion that the implementation of poverty reduction in accordance with local characteristics, the first aspect that needs to be addressed is the planning and budgeting system of the existing poverty reduction in the *RKP*, where the budget is still using the mechanism of poverty reduction Affairs Joint Fund (*DUB*). *DUB* centralized planning and budgeting is recommended to be reformulated into the Special Allocation Fund (*DAK*), so regions can be more powerful in planning, implementing and evaluating poverty reduction in accordance with regional characteristics as the results of this research. Transfer of *DUB* to *DAK* is not an impossible thing, because it was supported by the two policies namely The Law No. 33 year 2004 Article 108 and Government Regulation No. 7 year 2008 article 76, paragraph 1. Further improvements are recommended for the formulation of *DAK* not only for infrastructure but it can be used only for non-physical, with the planning and implementation developed by local government together with other stakeholders.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	Iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	viii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan Tesis .....	6
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	8
2.2 Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan .....	9
2.3 Perencanaan dan Penganggaran Berpihak pada Penduduk Miskin .....	12
2.4 Kemiskinan .....	15
2.5 Pengertian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Urusan Bersama (DUB).....	18
2.5.1 Pengertian Dekonsentrasi .....	18
2.5.2 Pengertian Tugas Pembantuan .....	19
2.5.3 Pengetian Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	20
2.5.4 Pengertian Dana Urusan Bersama (DUB) .....	20
<b>BAB III     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	22
3.2 Jenis Penelitian .....	23
3.3 Metode Penelitian .....	23
3.4 Teknik Pemilihan Informan .....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.6 Proses Penelitian dan Etika Penelitian .....	30
3.7 Teknik Analisa Data .....	33
3.8 Kerangka Evaluasi .....	34
3.9 Operasionalisasi Konsep .....	37
<b>BAB IV     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Sulawesi Selatan .....	38
4.1.1 Letak Geografis .....	38
4.1.2 Topografi .....	38

4.1.3	Jumlah Kabupaten/Kota .....	39
4.1.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	39
4.1.5	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi .....	39
4.1.6	Penganggaran .....	39
4.1.7	Indek Pembangunan Manusia.....	40
4.1.8	Umur Harapan Hidup .....	40
4.1.9	Pelayanan Publik .....	40
4.1.10	Kondisi Sosial Budaya.....	40
4.1.11	Kemiskinan .....	42
4.2	Kalimantan Barat .....	44
4.2.1	Letak Geografis .....	44
4.2.2	Topografi .....	44
4.2.3	Jumlah Kabupaten/Kota .....	44
4.2.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	45
4.2.5	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi .....	45
4.2.6	Penganggaran .....	45
4.2.7	Indek Pembangunan Manusia.....	45
4.2.8	Umur Harapan Hidup .....	46
4.2.9	Pelayanan Publik .....	46
4.2.10	Kondisi Sosial Budaya.....	46
4.2.11	Kemiskinan .....	46
<b>BAB V</b>	<b>EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>	<b>49</b>
5.1	Identifikasi Basis evaluasi .....	49
5.2	Kesesuaian Antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD 2009 .....	54
5.3	Proses Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di daerah .....	61
5.4	Keluaran Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah .....	65
5.5	Hasil Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah .....	67
5.6	Efektivitas Biaya .....	69
5.7	Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Di Daerah .....	74
5.8	Hasil Studi Evaluasi.....	78
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: USULAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....</b>	<b>82</b>
6.1	Kesimpulan .....	82
6.2	Rekomendasi .....	82
6.3	Usulan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan .....	83
6.3.1	Skenario Usulan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ..	83
6.3.2	Pelaksanaan Skenario III .....	86
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>108</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Tahun 2006-2009	3
Tabel 3.1	Tren Penurunan Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Tahun 2006-2009	23
Tabel 5.1	Kesesuaian Antara RKP 2009 dengan RKPD 2009 Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	55
Tabel 5.2	Evaluasi Pemangku Kepentingan Terhadap Relevansi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RKPD 2009 Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat dengan RKP 2009	60
Tabel 5.3	Evaluasi Pemangku Kepentingan Terhadap Proses Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	64
Tabel 5.4	Evaluasi Pemangku Kepentingan Terhadap Keluaran Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	67
Tabel 5.5	Evaluasi Pemangku Kepentingan Terhadap Hasil Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	68
Tabel 5.6	Evaluasi Pemangku Kepentingan Terhadap Efektifitas Biaya Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	74
Tabel 5.7	Perbandingan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	78
Tabel 6.1	Tiga Skenario Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	83
Tabel 6.2	Pertimbangan Utama Pengalihan Dana Urusan Bersama Menjadi DAK Penanggulangan Kemiskinan	100
Tabel 6.3	Skenario Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Melalui DAK yang Masuk Dalam APBD	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	9
Gambar 3.1	Kerangka Kajian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	36
Gambar 5.1	Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam RKP 2009	54
Gambar 5.2	Proporsi BLM APBD Dibandingkan Proporsi Penduduk Miskin Sulawesi Selatan	70
Gambar 5.3	Proporsi BLM APBD Dibandingkan Proporsi Penduduk Miskin Kalimantan Barat	71
Gambar 5.4	Proporsi BLM APBN Dibandingkan Proporsi Penduduk Miskin Sulawesi Selatan	72
Gambar 5.5	Proporsi BLM APBN Dibandingkan Proporsi Penduduk Miskin Kalimantan Barat	73
Gambar 5.6	Perbandingan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	79
Gambar 6.1	Mekanisme Kebijakan Penganggaran Nasional Untuk Penanggulangan Kemiskinan	87
Gambar 6.2	Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Urusan Bersama	92
Gambar 6.3	Sumber Pendanaan Urusan Bersama	94
Gambar 6.4	Garis Besar Formulasi Mekanisme Kebijakan Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke DAK Penanggulangan Kemiskinan	98



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Lembar Checklist Dokumen yang Diperoleh
- LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara Untuk Bappeda Provinsi
- LAMPIRAN 3 Pedoman Wawancara Untuk Pengurus dan Anggota CU
- LAMPIRAN 4 Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- LAMPIRAN 5 Tabel Evaluasi Afektivitas Biaya
- LAMPIRAN 6 Hasil Wawancara dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- LAMPIRAN 7 Hasil Wawancara dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
- LAMPIRAN 8 Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Pengurus dan Nasabah CU Pancur Kasih
- LAMPIRAN 9 Hasil Evaluasi Informan Akademisi Kalimantan Barat
- LAMPIRAN 10 Hasil Evaluasi Informan LSM Kalimantan Barat
- LAMPIRAN 11 Hasil Evaluasi Informan Bappeda Kalimantan Barat
- LAMPIRAN 12 Hasil Evaluasi Informan Akademisi Sulawesi Selatan
- LAMPIRAN 13 Hasil Evaluasi Informan Bappeda Sulawesi Selatan
- LAMPIRAN 14 Hasil Evaluasi Informan LSM Sulawesi Selatan
- LAMPIRAN 15 Alokasi PNPM dan Proporsi di Kalimantan Barat
- LAMPIRAN 16 Alokasi PNPM dan Proporsi di Sulawesi Selatan
- LAMPIRAN 17 Rekapitulasi Jawaban Informan Sulawesi Selatan
- LAMPIRAN 18 Rekapitulasi Jawaban Informan Kalimantan Barat